

## **Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**

**Mufidah\*, Masnun**

Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari

\*Correspondence email: [mufidahjufri@gmail.com](mailto:mufidahjufri@gmail.com)

**Abstrack.** *There are challenges in implementing village funds during this pandemic because the amount of absorption of village funds is used to address the conditions for handling Covid 19. The implementation of the distribution and absorption of this budget is influenced by inhibiting factors that become challenges in the implementation of village development. Internal factors in the village government are important to prevent fraud in the absorption of village funds. Therefore, one of the objectives of this study is to analyze the effect of internal control and competence on fraud prevention in Kumpeh Ulu sub-district, Muaro Jambi district. This research is causality research design. Causality research design is a type of research that is used for the purpose of testing the influence, relationship or impact of variables, the type of cross section data used and the primary data sources. This research took place from June to August 2021. The data analysis technique used SEM-PLS. The results of this study indicate that internal control and competence have an effect on fraud prevention.*

**Key words:** *Internal control; Competence; Fraud Prevention*

### **Pendahuluan**

Dana Desa merupakan kebijakan yang baru bagi Desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang *bussiness processnya* hampir sama dengan tingkat Pemerintah Daerah. Lemahnya sumberdaya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan ke-uangan desa (berdasarkan Permendagri 37/2007) dan adanya alokasi dana desa, seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri No.37/2007 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewanya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibu-tuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya.

Masih banyaknya desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP No. 32 tahun 2004, (3) Masih lemahnya *skill* (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (5) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). Permasalahan seperti di atas muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di desa. Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata pada kantor kepala desa sudah ada informasi

papan nama yang menunjukkan penggunaan dana desa, namun informasi tersebut masih belum mendapat kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat. Masyarakat desa menuntut akuntabilitas dan transparansi laporan dana desa yang sepenuhnya. Sedangkan dari aparat desa belum dapat menunjukan secara detail mengenai penggunaan dana desa tersebut dikarenakan ada beberapa penggunaan dana diluar bidang prioritas seperti sebagian besar dana desa digunakan hanya untuk perbaikan jalan desa dan pekerjaan ini dilakukan oleh pihak ketiga dan hasil yang terlihat oleh masyarakat belum memuaskan. Masih kurangnya program-program pembinaan kepada masyarakat karena porsi dana lebih banyak ke kegiatan fisik. Serta belum sesuainya pelaporan perpajakan dengan ketentuan yang berlaku.

Objek penelitian ini adalah desa yang terletak di kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi ini mempunyai 150 desa dan 14 Kelurahan. Kabupaten ini mengalami penurunan dalam mendapatkan total dana desa pertahunnya yaitu pada tahun 2017 sebanyak Rp. 117.519.276.000 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 107.170.632.000. Fenomena dari kabupaten ini adalah tidak diperolehnya penghargaan terbaik dalam penyaluran DAK fisik dan tingkat realisasi penggunaan. Adapaun yang menerima piagam penghargaan kepada kabupaten /kota terbaik dalam penyaluran DAK Fisik dan dana desa tahun 2018, dengan kriteria tingkat realisasi penyaluran, ketepatan waktu dan tingkat realisasi penggunaan yaitu kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Beberapa desa di Kecamatan Kumpeh Ulu terdapat pengantian kepala desa yang baru, dimana kepala desa baru menjabat selama beberapa bulan. Ini memerlukan keterampilan untuk lebih memahami mengenai penggunaan dana desa sehingga untuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat belum maksimal. Selain itu adanya pelatihan mengenai keuangan yang dilakukan dari petugas di luar provinsi Jambi sehingga di saat ada masalah, mengenai teknis ataupun non teknis mereka hanya bisa berkomunikasi via telepon karena memasuki masa pandemic covid-19 sehingga permasalahan yang ada masih belum dapat diselesaikan tanpa melihat bukti dan fakta yang ada di desa. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Selain itu ada perubahan regulasi yang menyebabkan PTPKD merasakan kebingungan dalam menyerap aturan regulasi tersebut. Untuk pelaporan online masih terkendala instalasi karena masih belum ada jaringan internet, hanya mengandalkan signal yang kualitasnya kurang baik.

Sisi Penggunaan, masih terdapat penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Hal tersebut masih perlu penyempurnaan dalam hal dana desa. Hal ini terlihat dalam laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 dimana realisasi penggunaan anggaran dana desa belum sesuai dengan anggaran yang direncanakan, artinya realisasi penggunaan anggaran lebih rendah dari rencana, sehingga banyak dana yang tidak terserap. Selain itu pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan warga desa masih kurang atau penggunaan di luar bidang prioritas. Selain itu Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengurus PTPKD. Hal ini dikarenakan masyarakat masih kurang dalam pemanfaatannya karena sebagian besar dana desa digunakan untuk infrastruktur memperbaiki jalan, namun kenyataannya jalan masih rusak dan berdebu, sehingga mempengaruhi kebersihan lingkungan dan kesehatan warga.

Tahun 2019 Provinsi Jambi memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar Rp1,2 triliun dan Dana Desa 1,1 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan terlebih dahulu mengevaluasi dan mengatasi beberapa kendala yang dialami pada penyaluran tahun sebelumnya. Sinergi antara Pemerintah Daerah, dalam hal ini Inspektorat Daerah, BPKAD, BPMPD, dengan KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tentunya penting untuk dilakukan guna kelancaran penyaluran dana untuk pembangunan di Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal dan kompetensi terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa di kecamatan kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi.

### *Pengendalian Internal*

Pengendalian Internal adalah suatu rencana organisasi dan metode yang dapat digunakan untuk menjaga atau melindungi asset, untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Semua pengendalian dapat digolongkan dalam pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif. Kata kunci untuk pengendalian intern aktif adalah to prevent, mencegah oleh karena itu dalam beberapa penelitian penggunaan tujuan pengendalian internal aktif dan pengendalian internal pasif adalah sama yaitu mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Sarana-sarana pengendalian internal aktif yang sering dipakai dan umumnya sudah dikenal dalam system akuntansi meliputi: tanda tangan, tanda tangan kaunter (*countersigning*), password dan pin, pemisahan tugas, pengendalian asset secara fisik, pengendalian persediaan secara real time, pagar, gembok, dan semua bangunan dan penghalang fisik, pencocokan dokumen, formulir yang sudah dicetak nomornya. (Mufidah, 2017)

### *Kompetensi*

Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural dan pengalaman kepemimpinan. Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas aparatur desa dapat mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan dana desa. Dimensi peningkatan kompetensi aparatur desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Tiga tingkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu: (1) Kemampuan dasar yang harus dimiliki yaitu pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. (2) Kemampuan manajemen meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan public, manajemen asset dan manajemen keuangan. (3) Kemampuan teknis meliputi penyusunan administrasi desa, perencanaan pembangunan desa, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan desa dan pelayanan public (Mufidah, 2017)

### *Pencegahan Kecurangan /Fraud*

Fraud atau kecurangan adalah kejahatan yang dapat ditangani dengan dua cara yaitu dengan mencegah dan mendeteksi. Menurut para ahli, fraud atau kecurangan yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya (Mufidah, 2017). Akar permasalahan atau penyebab dari fraud yaitu fraud by need, by greed, and by opportunity. Untuk unsur by opportunity biasanya ditekankan melalui pengendalian internal yang efektif.

### *Hipotesis*

Tujuan yang dikemukakan diatas dapat ditarik dugaan sementara yang akan ditindaklanjuti dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dana desa di Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi .
2. Kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan fraud dana desa di Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi .

### **Metode**

Metode penelitian yang digunakan adalah desain riset kausalitas. Dimana desain riset kausalitas ini merupakan desain riset yang digunakan dengan tujuan menguji pengaruh, hubungan atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen (atau konstruk eksogen terhadap konstruk endogen dalam analisis SEM. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian dana desa ini jenis data crosssection dan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa hasil jawaban dari kuisioner yang telah dikumpulkan langsung dari responden yaitu aparat desa di kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi sedangkan sumber data sekunder adalah berupa data-data laporan keuangan dana desa dan jurnal-jurnal penelitian. Tehnik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terdaftar menerima dana desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. dengan objek penelitian adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitian ini tidak seluruh anggota populasi diambil, melainkan hanya sebagian dari populasi dikarenakan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Oleh karena itu sampel yang diambil harus betul- betul *representatif* (benar-benar mewakili). Sampel tersebut diambil dari populasi dengan menggunakan persentase tingkat kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 5%. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling (Pengambilan sampel secara acak sederhana) dengan menggunakan rumus slovin dan sampel akan dipilih secara acak. Rumus slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Berdasarkan jumlah desa yang menerima dana desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi terdapat 18 desa di setiap desa terdapat kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD atau disebut juga PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa) dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 3 ayat (3) terdiri dari Sekretaris desa, Kepala urusan (Kaur) dan kepala seksi (kasi). Kepala urusan (Kaur yang terdiri dari kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan), kepala seksi (kasi) terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan Kepala seksi Pelayanan. Rata- rata desa mempunyai Kaur sebanyak 3 orang dan kepala seksi (Kasi) sebanyak 3 orang jadi total populasi untuk satu desa adalah delapan (8) orang maka jumlah populasi adalah kepala desa beserta PPKD untuk Kecamatan Kumpeh Ulu

kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari 18 desa adalah 144 orang. maka sampelnya dengan menggunakan rumus slovin diatas adalah 105 orang yang menduduki jabatan kepala desa, dan perangkatnya. Pengumpulan data penelitian di lakukan satu tahap, yaitu dengan cara memberikan pada tanggal 1 Agustus 2021 dan kembali selama 2 minggu pada tanggal 14 Agustus 2021. Dari kuisisioner penelitian yang dibagikan, kembali 55 set, dari jumlah tersebut, lima set kuisisioner tidak bisa diolah karena jawabannya tidak lengkap, sedangkan sisanya lagi tidak kembali . Jadi kuisisioner yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data hanya sebanyak 50 set. Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan maka diperoleh data tentang demografi responden penelitian yang terdiri dari: (1) Pengalaman/masa kerja di Pemerintahan desa dan (2) tingkat pendidikan responden:

**Tabel 1.**  
**Pengalaman/ Masa Kerja**

No	Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
1	Kurang dari 3 tahun	23	46 %
2	Tiga – Lima tahun	13	26 %
3	Lebih dari Lima tahun	14	28 %
	Total	50	100 %

Sumber : Data diolah

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa aparat di desa kec. Kumpeh Ulu Jambi rata – rata belum cukup berpengalaman yang ditunjukkan dengan kurang dari lima tahun masa kerja sebanyak 46 %. Berikut adalah data responden berdasarkan pendidikan .

**Tabel 2.**  
**Latar belakang Pendidikan**

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	32	64 %
2	D3	1	2 %
3	S1	14	28 %
4	S2	3	6 %
5	S3	0	0
	Total	50	100 %

Sumber : Data diolah

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar aparat desa berlatar pendidikan SMA dan dari hasil kuisisioner juga diperoleh bahwa yang telah dilatih melalui pelatihan-pelatihan dana desa dan pelatihan lainnya hanya sebagian kecil saja. Dengan kurangnya pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan minimnya pelatihan yang diikuti, ini masih menunjukkan minimnya kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Dimana: Y = Pencegahan Kecurangan; X<sub>1</sub> = Pengendalian Internal; X<sub>2</sub> = Kompetensi; a = Intercept; β<sub>1</sub> & β<sub>2</sub> = Slope; ε = Error term

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, ukuran serta skala dari variable-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar. Berikut ini pembahasan definisi operasional yang menjelaskan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini .

1. Pengendalian internal (X<sub>1</sub>), adalah suatu rencana organisasi dan semua ukuran-ukuran dan prosedur yang dibuat dalam suatu perusahaan untuk tujuan (1) mengamankan harta (2) Mendorong ketaatan terhadap kebijak sanaan perusahaan (3) meningkatkan efisiensi usaha dan (4) menjamin adanya catatan akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya. Dimensi yang digunakan untuk mengukur konsep ini adalah: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan, Informasi dan komunikasi
2. Kompetensi (X<sub>2</sub>), Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tepat dan pantas. Dimensi yang digunakan untuk mengukur konsep ini adalah Pengetahuan Umum, Keahlian khusus.
3. Pencegahan kecurangan (*Fraud*) (Y<sub>1</sub>). Dimensi yang digunakan untuk mengukur konsep ini adalah: inventarisasi, pemisahan fungsi, dokumen, pengamanan

## Hasil

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistic deskriptif dan analisis statistic inferensial. Analisis statistic deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk digeneralisasikan. Statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain: penyiapan data dalam bentuk tabel, gambar, perhitungan rerata skor, perhitungan prosentase, dan lain-lain. Analisis statistik inferensial diukur dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yaitu software Smart PLS Penelitian in menggunakan tiga variabel laten yang terdiri dari 2 variabel eksogen dan 1 variabel endogen. Variabel eksogen yaitu pengendalian internal dan kompetensi. Variabel endogen yaitu Pencegahan fraud. Tanggapan dari responden yang terdapat di kecamatan kumpeh Ulu untuk variabel pengendalian internal, kompetensi dan pencegahan kecurangan

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Rata- Rata Skor Mengenai Pengendalian Internal**

Dimensi	Rata- rata Skor	Kriteria
Lingkungan Pengendalian	4,23	Baik
Penilaian Resiko	3,98	Cukup
Aktivitas Pengendalian	3,98	Cukup
Informasi Komunikasi	4,25	Baik
Pemantauan	4,09	Baik
Pengendalian Internal	4,10	Baik

Sumber : Data diolah

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Rata- Rata Skor Mengenai Kompetensi**

Dimensi	Rata- rata Skor	Kriteria
Pengetahuan Umum	4.46	Baik
Keahlian Khusus	4,04	Baik
Kompetensi	4,25	Baik

Sumber : Data diolah

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Rata- rata skor mengenai Pencegahan Kecurangan**

Dimensi	Rata- rata Skor	Kriteria
Inventarisasi Aset	4,06	Baik
Pemisahan fungsi	4,24	Baik
Dokumen	4,22	Baik
Pengamanan	4,20	Baik
Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> )	4,18	Baik

Sumber : Data diolah

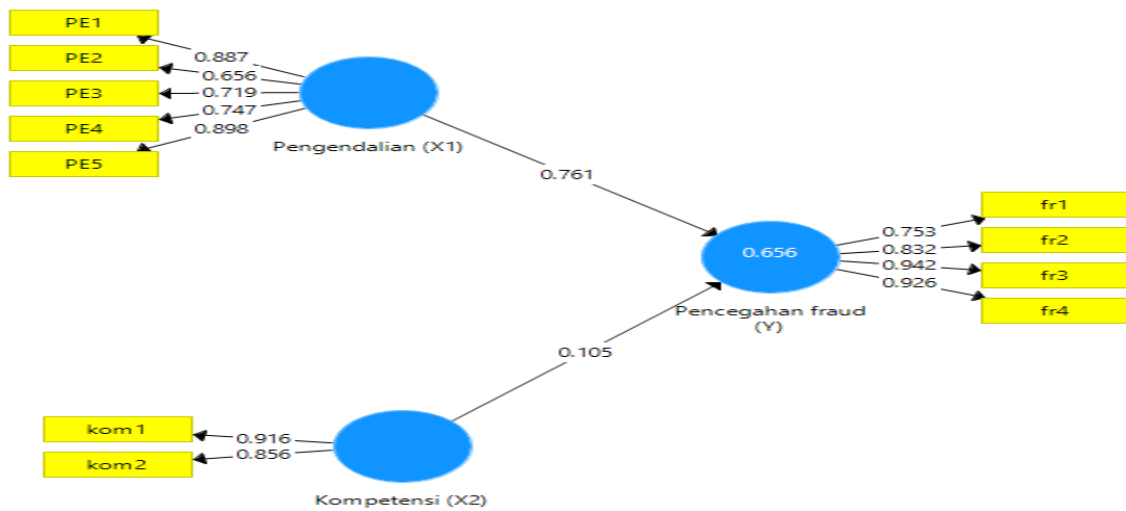
Pada Tabel 1 sampai dengan 5 secara keseluruhan variabel pengendalian internal, kompetensi akuntansi memiliki rata-rata skor tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kompetensi telah berjalan dengan baik, namun dari sisi dimensi aktivitas pengendalian dan penilaian resiko pada variabel pengendalian internal baru memasuki kategori cukup atau masih kurang optimal.

### *Analisis Statistik Inferensial*

Berikut ini evaluasi model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas.

#### 1) Uji validitas

Uji validitas data dilakukan pada saat evaluasi outer model dengan indicator reflektif dievaluasi melalui validitas convergent dan *discriminant validity*. Uji *convergent validity* dilakukan untuk mengetahui validitas dari indicator yang digunakan. Indikator dinyatakan valid dengan nilai *loading factor* berkisar di atas 0,50. Hasil evaluasi *convergent validity* dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa hasil ouput analisis dapat dilihat bahwa semua konstruk dengan indicator reflektif menghasilkan nilai *loading factor* > 0,5. *Convergent validity* dari measurement model dengan indicator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indicator dengan score konstraknya. Indikator individu dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70. Namun pada riset pengembangan skala *loading* 0,50 - 0,60 masih dapat diterima. Artinya bahwa semua indicator konstruk adalah valid. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1 Loading Factor

2) Uji Reliability

Pengujian reliabilitas untuk data semantic differensial dilaksanakan untuk mengetahui apakah kuisioner reliable atau tidak. Uji reliabilitas dilaksanakan dengan menggunakan uji *Average Variance Extranced (AVE)* dan uji *Composite reliability*.

Tabel 6 Average Variance Extranced ( AVE)

Variabel Laten	Composite Reliability	AVE	Keterangan
Pencegahan <i>Fraud</i>	0.923	0.751	Reliabel
Kompetensi	0.881	0.781	Reliabel
Pengendalian Internal	0.889	0.620	Reliabel

Sumber : Data diolah

Konstruks variabel diatas memiliki reliabilitas yang baik jika nilai composite reliability diatas memiliki nilai 0,80 dan nilai AVE diatas 0,50, berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat disimpulkan maka semua variabel memenuhi reliabilitas.

Tabel 7 Path Coefficients

	Original Sample	Sample mean	Standard Deviasi	T Statistic	P Values
Pengendalian Internal (X <sub>1</sub> )? Pencegahan Fraud ( Y)	0.761	0.786	0.076	10.005	0.000
Kompetensi (X <sub>2</sub> )? Pencegahan fraud	0.105	0.088	0.111	0.942	0.347

Sumber : Data diolah

Nilai R square yang diperoleh sebesar 0.656 , ini berarti bahwa pengendalian intenal dan kompetensi secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 65,6% terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

*Pengaruh Pengendalian internal terhadap Pencegahan Kecurangan*

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat nilai T-hitung variabel Pengendalian --> *Fraud* (10.005) lebih besar dibanding t-kritis (1,96) . Karena nilai t hitung lebih besar dibanding t kritis di tingkat kekeliruan 5%. Jadi Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* di pemerintahan kecamatan kumpeh ulu Kabupaten MuaroJambi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Oktaviyanti et al., 2017), (Soleman, 2013), (Arfah, 2011), (Mufidah, 2017) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pencegahan *fraud*, hal ini juga menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, maka akan semakin efektif pula

pelaksanaan prosedur audit dalam hal ini mencegah terjadinya tindak kecurangan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Mufidah & Sari, 2018) bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh pada pencegahan fraud pada travel haji dan umroh di kota jambi.

#### *Pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan Kecurangan*

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat nilai T-hitung variabel Kompetensi --> *Fraud* (0,942) lebih kecil dibanding t kritis (1,96). Karena nilai t hitung lebih kecil dibanding t kritis di tingkat kekeliruan 5%. Jadi Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* di kecamatan kumpoh ulu . Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik kompetensi pegawai aparat desa tidak berpengaruh dalam meningkatkan pencegahan *fraud*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Oktaviyanti et al., 2017), (Budiarto et al., 2020), yang menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

#### **Simpulan**

Berdasarkan hipotesis, hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan sedangkan kompetensi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pencegahan kecurangan . Hal ini disebabkan karena kompetensi aparat desa yang masih belum memadai . Oleh karena itu diperlukannya kebijakan dari pemerintah untuk memfasilitasi pelatihan untuk menambah kompetensi dari aparat desa.

#### **Daftar Pustaka**

- Arfah, E. A. (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan ( Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung ). *Jurnal Investasi*, 7(2), 137–153.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Antecedent yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>
- Mufidah. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Persediaan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Upaya Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Persediaan Pada Pt Mitra Jambi Pratama. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3), 42–58.
- Mufidah, M., & Sari, A. P. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagai Variabel Intervening pada Travel Haji dan Umrah di Kotamadya Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i2.46>
- Oktaviyanti, P. M., Herawati, N. T., & Atmadja, A. W. T. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng). *SI Ak*, 8(2), 1–10.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pen cegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74.